

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

PROBLEMATIKA HAK PREFEREN PIUTANG PAJAK DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. YINCHENINDO MINING INDUSTRY

(Renvoi Prosedur di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Kasasi dan Peninjauan Kembali di
Mahkamah Agung)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaaan
dalam bidang Ilmu Hukum (Sarjana Hukum – S.H)

Oleh :

HARIS SANJAYA

NIM : 201410110311353



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PROBLEMATIKA HAK PREFEREN PIUTANG PAJAK DALAM
PERKARA KEPAILITAN PT. YINCHENINDO MINING INDUSTRY
(RENYOI PROSEDUR DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT,
KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG)**

Diajukan Oleh:

HARIS SANJAYA

201410110311353

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Januari 2019

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping

Mohammad Isrok, SH., CN., M.H.



Dekan,

Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

SKRIPSI

Disusun oleh:

HARIS SANJAYA

201410110311353

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Januari 2019

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Mohammad Isrok, SH., CN., M.H.

Penguji I : Komariah, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HARIS SANJAYA

NIM : 201410110311353

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROBLEMATIKA HAK PREFEREN PIUTANG PAJAK DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. YINCHENINDO MINING INDUSTRY (RENVOI PROSEDUR DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG)

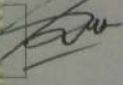
Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS, ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Maret 2019




Haris Sanjaya

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

*“KULIAHKU ADALAH AMANAH DARI KEDUA ORANG TUAKU UNTUK
DIJALANKAN DENGAN PENUH SYUKUR DAN HIKMAT”*

*Semoga ALLAH Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa mempermudah kelancaran
setiap usaha hamba-Nya, sungguh tiada daya dan kekuatan kecuali dengan
pertolongan-Nya*



Motto :

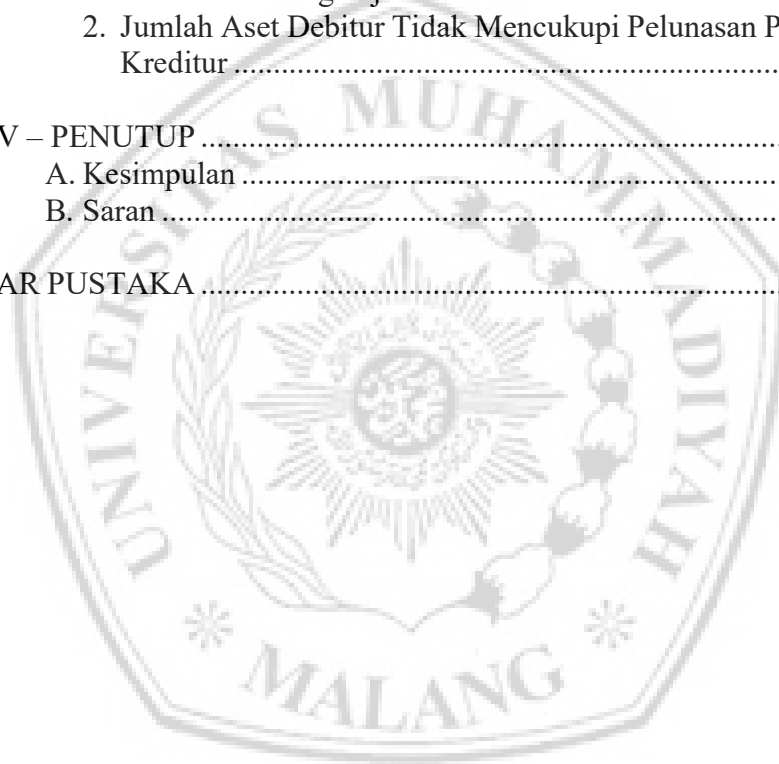
“KEBAIKAN HARUS DITOPANG DENGAN KEKUATAN DAN KECERDASAN”

Kalau tidak, kebaikan hanya menjadi kelemahan

DAFTAR ISI

Cover/Sampul Dalam	i
Lembar Pengasahan	ii
Surat Pernyataan.....	iv
Ungkapan Pribadi Dan Motto	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
 BAB I – PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penulisan	12
D. Manfaat Penulisan	13
E. Kegunaan Penulisan	13
F. Metode Penulisan	14
1) Metode Pendekatan	15
2) Jenis Bahan Hukum	16
3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
4) Teknik Analisis Bahan Hukum	17
G. Sistematika Penulisan.....	18
 BAB II – KAJIAN PUSTAKA	 20
A. Asas Preferensi Hukum	20
1. <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i>	21
2. <i>Lex Superior Derogat Legi Inferiori</i>	22
3. <i>Lex Posterior Derogat Legi Priori</i>	22
B. Pengaturan Kepailitan Di Indonesia	24
1. Pengertian Kepailitan	24
2. Para Pihak Dalam Kepailitan	28
3. Permohonan Pailit	31
4. Pengurusan Harta Pailit.....	34
5. Kreditur Dalam Kepailitan.....	37
6. Upaya Hukum Kepailitan.....	39
C. Pengaturan Perpajakan Di Indonesia	46
1. Pengertian Pajak.....	46
2. Subjek Pajak.....	47
3. Objek Pajak	50
4. Utang Pajak	52
5. Penagihan Pajak	55
6. Pajak Dalam Kepailitan.....	57

BAB III – PEMBAHASAN.....	64
A. Penerapan Hak Preferen Piutang Pajak Dalam Kepailitan PT. Yinchenindo Mining Industry (PT. YMI).....	64
1. Permohonan Pailit Terhadap PT. YMI	64
2. Permohonan Peninjauan Kembali Status Pailit PT. YMI	70
3. Permohonan Renvoi Prosedur Tagihan Pajak PT. YMI	74
4. Permohonan Kasasi Tagihan Pajak PT. YMI	83
5. Permohonan Peninjauan Kembali Tagihan Pajak PT. YMI.....	87
B. Problematika Hak Preferen Piutang Pajak Dalam Kepailitan PT. Yinchenindo Mining Industry (PT. YMI).....	92
1. Disharmoni UU Kepailitan Dan UU Perpajakan Terkait Hak Preferen Piutang Pajak	92
2. Jumlah Aset Debitur Tidak Mencukupi Pelunasan Piutang Para Kreditur	97
BAB IV – PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103



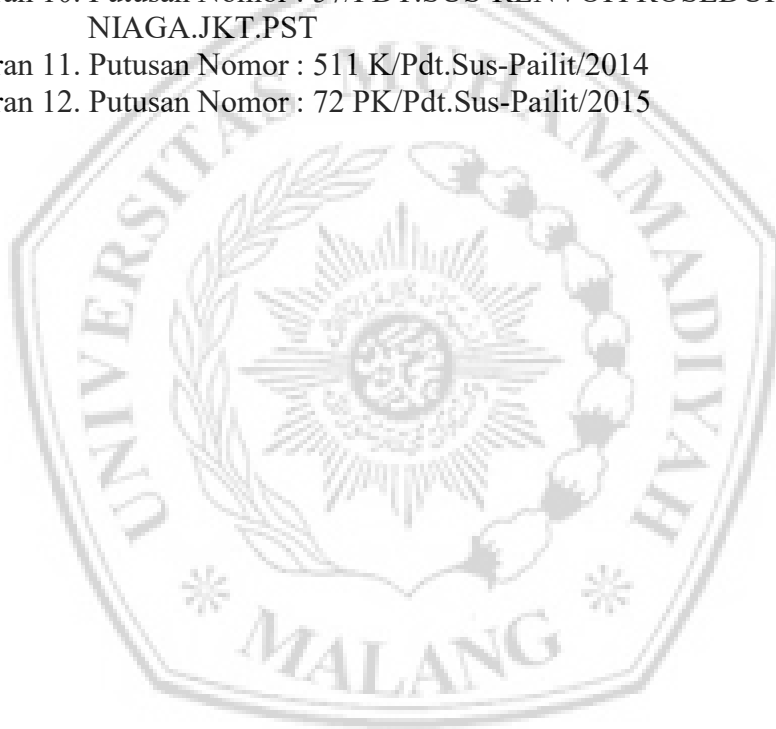
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penerimaan Pajak Dalam APBN 2015-2018	3
Tabel 2. Tagihan Kreditur Diakui	9
Tabel 3. Pembagian Kepada Kreditur	10
Tabel 4. Total Hutang YTIGL Kepada DBS Bank	66
Tabel 5. Perbandingan Kedudukan Kreditur Kepailitan	96



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas
- Lampiran 2. Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 3. Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal
- Lampiran 4. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 5. Surat Ijin Observasi Penelitian (Mengambil Salinan Putusan)
- Lampiran 6. Surat Telah Melakukan Observasi Penelitian (Mengambil Salinan Putusan)
- Lampiran 7. Kartu Bukti Peserta Seminar Proposal
- Lampiran 8. Putusan Nomor : 57/Pailit/2011/PN. Niaga.Jkt.Pst
- Lampiran 9. Putusan Nomor : 13/PK/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Lampiran 10. Putusan Nomor : 57/PDT.SUS-RENVOI PROSEDUR/2011/PN. NIAGA.JKT.PST
- Lampiran 11. Putusan Nomor : 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014
- Lampiran 12. Putusan Nomor : 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku :

- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Cet. 1. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cetakan Kedu. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.
- Aria Sujadi. 2004. *Kepailitan Di Negeri Pailit*. Jakarta. Penerbit Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.
- Billy Ivan Tansuria. 2010. *Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu.
- Imran Nating. 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Penerbit Bayumedia.
- Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika..
- Kartono. 1985. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran Utang*. Jakarta. Penerbit Pradnya Paramita.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2010. Yogyakarta. Penerbit C.V Andi Offset.
- 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta. Penerbit CV. Andi Offset.
- Marihot Siahaan. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

- Munir Fuady. 2010. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Grup.
- 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Grup.
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta. Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu Hartini. 2012. *Hukum Kepailitan*. Cet. 3. Malang. Penerbit UMM Press.
- 2017. *BUMN Persero Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan di Indonesia*. Malang. Penerbit Setara Press.
- 2017. *Hukum Kepailitan*. Cet. 4. Malang. Penerbit UMM Press.
- Rochmat Soemitro. 1998. *Asas Dan Perpajakan I*. Jakarta. Penerbit Rafika Aditama.
- Santoso Brotodihardjo. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung. Penerbit Rafika Aditama.
- Santoso Sembiring. 2006. *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Kepailitan*. Bandung. Penerbit CV. Nuansa Aulia.
- Sari Pudyatmoko. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Soejono Soekanto. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit UI Press.

Sumyar. 2004. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Cet. 1. Yogyakarta. Penerbit Universitas Atmajaya.

Sutan Remy Sjahdeni. 2009. *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta. Penerbit Pustaka Utama Grafiti.

..... 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Cet. 1. Jakarta. Penerbit Prenadamedia Group.

Titik Tejaningsih. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Separatis*. Cet. 1. Yogyakarta. Penerbit FH UII Press.

Zainal Asikin. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.

B. Makalah/Prosiding/Jurnal/Skripsi/Tesis :

Berdikari Panjaitan. 2016. *Legalitas Pembagian Hasil Penjualan Jaminan Fidusia Untuk Pelunasan Utang Pajak Dan Pertanggungjawaban Kurator (Studi Kasus Kepailitan PT. Yinchenindo Mining Industry)*. Yogyakarta. Program Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada, <http://etd.repository.ugm.ac.id>, diakses tanggal 10 April 2018.

Eliana Tansah. 2008. *Materi III Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak Versus Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Kepailitan Perusahaan*. Jakarta. Prosiding Seminar Nasional Kepailitan Antisipasi Krisis Keuangan Kedua 29 Oktober 2008. USAID In ACCE Project & AKPI, <https://id.scribd.com>, diakses tanggal 15 Maret 2018.

- Fernandez. 2012. *Tinjauan Yuridis Hak Mendahului Pelunasan Utang Pajak Atas Harta Pailit Dan Penyelesaian Utang Pajak Dalam Kepailitan*. Depok. Fakultas Hukum. Program Sarjana Reguler. Universitas Indonesia, lib.ui.ac.id, diakses tanggal 1 September 2018.
- Hardijan Rusli. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Jurnal Law Review. Vol. V No. 3. Fakultas Hukum. Universitas Pelita Harapan, <http://download.portalgaruda.org>, diakses tanggal 15 Januari 2018.
- Jessica Tanuwijaya dan Doni Budiono. 2014. *Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Surabaya. Jurnal Tax & Accounting Review. Vol. 4. No. 1. Program Akuntansi Pajak. Program Studi Akuntansi. Universitas Kristen Petra, <https://media.neliti.com> diakses tanggal 30 Oktober 2018.
- Paulus Herdianto Manurung. 2015. *Hak Mendahului Tagihan Pajak Untuk Wajib Pajak Yang Dinyatakan Pailit*. Medan. Jurnal Premise Law. Vol. 11 No. 7. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara, <https://jurnal.usu.ac.id>, diakses tanggal 8 Mei 2018.
- Rahayu Hartini. 2018. *Payment of Tax Dues And Workers' Wages In Bankruptcy In Indonesia*. Malang. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ratih Candrakirana. 2016. *Hak Mendahului Negara Atas Pembayaran Utang Pajak Dalam Putusan Pengadilan Niaga*. Malang. Pascasarjana Kenotariatan Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya, <http://media.neliti.com>, diakses tanggal 1 Mei 2018.

Reynold Martinus Halim (et.al). 2012. *Pelaksanaan Pembayaran Utang Kreditur Preferen Dalam Kasus Kepailitan*. Makassar. Fakultas Hukum. Program Pascasarjana (S2). Universitas Hasanuddin, pasca.unhas.ac.id, diakses tanggal 24 Agustus 2018.

Shinta Agustina. 2015. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 44 No. 4. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro, <https://ejournal.undip.ac.id> diakses tanggal 23 Agustus 2018.

Stefanus Kurniawan Dharmadji. 2014. *Akibat Hukum Penghapusan Piutang Pajak Atas Kepailitan Perseroan Terbatas Bagi Para Kreditor*. Surabaya. Fakultas Hukum. Universitas Wijaya Kusuma, diakses tanggal 10 Oktober 2018

Yustinus Prastowo. 2018. *Perihal Pajak Dan Kedudukannya Dalam Proses Kepailitan*. Jakarta. Makalah Pendidikan Kurator dan Pengurus Angkatan XXV 4 Oktober 2018. AKPI, diperoleh tanggal 23 Oktober 2018.

C. Artikel Internet :

A.A. Oka Mahendra. 2010. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemen-kumham.go.id> diakses tanggal 25 Agustus 2018.

Amrozi, 2010. *Ask-Renvoi Proses Pada Pengadilan Niaga*, lawyers.forumotion.net, diakses tanggal 28 Maret 2018.

Dadang Sunendar. (et.al). 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*. kbbi.kemendikbud.go.id, diakses tanggal 10 Januari 2018.

- Direktorat Penyusunan APBN. (ed.). 2015. *Informasi APBN 2016*. Jakarta. Penerbit Direktorat Jenderal Anggaran Menkeu RI, <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 14 Januari 2018.
- Direktorat Penyusunan APBN. (ed.). 2016. *Informasi APBN 2017*, Jakarta. Penerbit Direktorat Jenderal Anggaran Menkeu RI, <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 14 Januari 2018.
- Direktorat Penyusunan APBN. (ed.). 2017. *Informasi APBN 2018*, Jakarta. Penerbit Direktorat Jenderal Anggaran Menkeu RI, <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 14 Januari 2018.
- Kunta W.D Nugraha. (ed.). 2014. *Budget In Brief APBN 2015*. Jakarta. Penerbit Direktorat Jenderal Anggaran Menkeu RI, <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 14 Januari 2018.
- Pataniari Siahaan. (et.al). 2007. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*. Jakarta. Penerbit Sekertaris Jenderal MPR RI, <http://manunggalkusuma-wardaya.files.wordpress.com>, diakses tanggal 7 Februari 2018.
- Rahayu Hartini. 2012. *Tindak Pidana dan Perdata dalam Perpajakan (Bagian I)*. Media Online Gagasan Hukum. ISSN 1979-9373. Penerbit Slamet Hariyanto & Rekan. Edisi 24 Desember 2012. Malang, <https://gagasanhukum.wordpress.com>, diakses tanggal 14 Januari 2018.
- Shidarta dan Petrus Lakonawa. 2018. *Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna Dan Penggunaannya*. Jakarta. Penerbit BINUS University. Rubric of Faculty Members. Dipublikasikan pada 3 Maret 2018, <http://business-law.binus.ac.id> diakses pada 22 Agustus 2018.

Suparmanto, *Melalui Pajak, Kita Membangun Negeri*, www.pajak.go.id, diakses tanggal 11 Januari 2018.

D. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP)

Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan (PMK No. 68/PMK.03/2012)